

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Maria Meditha Loi

NPP. 32.0660

Asdaf Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0635@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The most prominent waste problem in Belu Regency is seen from the lack of public awareness and the TPS function which is not functioning properly in the market area, resulting in piles of waste being spread everywhere and also the impact of this is the scattering of waste that fills the cross-border roads of Atambua City and Belu Regency.*

**Purpose:** *This study aims to describe about Collaborative Governance in waste management in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. **Method:** This research uses a qualitative approach with a case study method, involving interviews, observations, and document analysis, as well as using the theoretical framework from Ratner (2012) which emphasizes three dimensions, namely identification of problems and obstacles, strategy for resolution steps, and planning collaborative actions. **Result:** The study shows that in the dimension of identifying obstacles and opportunities, there are still a number of obstacles that hinder collaborative governance efforts in waste management in Belu Regency. These obstacles include low public awareness, limited number of Satpol PP and Environmental Service personnel, and waste management facilities and infrastructure that are not yet optimal. In the dimension of the strategy for solving steps, various strategic efforts have been carried out such as socialization and education in schools, markets, and places of worship, raids and patrols, waste management training, campaigns, mutual cooperation, and closing illegal waste disposal sites (TPS). These strategies have so far been considered to be running quite well and have had a positive impact on waste management efforts. Meanwhile, in the dimension of collaborative action planning, the success of the collaboration has begun to be seen through increasing public awareness and the increasing volume of waste that has been successfully managed. In addition, periodic evaluations are also carried out to prepare for more optimal follow-up collaborations in the future. **Conclusion:** Therefore, it can be concluded that the collaboration between the government through the Belu Regency Environmental and Transportation Service and the Belu Regency Civil Service Police Unit has been running but has not been optimal because dimensions related to problems and obstacles are still found and need to be improved, namely related to public awareness, number of personnel, and infrastructure that must be improved for the sustainability of future collaboration.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Waste Management*

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian):** Masalah persampahan di Kabupaten Belu yang sangat menonjol yaitu dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dan fungsi TPS yang tidak berfungsi dengan baik di daerah pasar sehingga menimbulkan adanya timbunan sampah yang menyebar dimana-mana dan juga dampak dari hal tersebut adalah tebaran sampah yang memenuhi jalanan lintas perbatasan Kota Atambua Kabupaten Belu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan tentang *Collaborative Governance* dalam penanganan sampah di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara, observasi, serta analisis dokumen serta dengan menggunakan kerangka teori dari Ratner (2012) yang menekankan pada tiga dimensi yaitu identifikasi masalah dan hambatan, strategi langkah penyelesaian, dan merencanakan tindakan kolaborasi. **Hasil/Temuan:** penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi identifikasi hambatan dan peluang, masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat upaya *collaborative governance* dalam penanganan sampah di Kabupaten Belu. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan jumlah personel Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup, serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum maksimal. Pada dimensi strategi langkah penyelesaian, telah dilakukan berbagai upaya strategis seperti sosialisasi dan edukasi di sekolah, pasar, dan rumah ibadah, razia dan patroli, pelatihan pengelolaan sampah, kampanye, gotong royong, hingga penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) liar. Strategi-strategi tersebut sejauh ini dinilai berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap upaya penanganan sampah. Sementara itu, pada dimensi perencanaan tindakan kolaborasi, keberhasilan kolaborasi sudah mulai terlihat melalui meningkatnya kesadaran masyarakat serta bertambahnya volume sampah yang berhasil dikelola. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mempersiapkan kolaborasi lanjutan yang lebih optimal ke depannya. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu sudah berjalan namun belum maksimal karena dimensi terkait dengan masalah dan hambatan masih ditemukan dan perlu ditingkatkan yaitu berkaitan dengan kesadaran masyarakat, jumlah personil, dan sarana prasarana yang harus di tingkatkan untuk keberlanjutan kolaborasi kedepannya..

**Kata kunci:** *Collaborative Governance*, Penanganan Sampah

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dinamika pemerintahan global saat ini terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas persoalan sosial, termasuk persoalan lingkungan hidup. Hal ini mendorong sistem pemerintahan di Indonesia untuk mengadopsi pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan partisipatif (Valentina et al., 2025). Salah satu pendekatan yang kini banyak diterapkan adalah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi lintas sektor: pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Perubahan paradigma dari *good government* menuju *collaborative governance* merupakan langkah penting dalam mendemokratisasi administrasi publik, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan yang bersifat lintas sektoral seperti penanganan sampah (Bodin, 2017). model *collaborative governance* efektif dalam menyelesaikan persoalan persampahan jika dilaksanakan dengan pelibatan aktif seluruh stakeholder secara inklusif dan adanya forum kolaboratif yang

berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative Governance* menjadi sebuah cara baru dalam mengatur roda pemerintahan saat ini karena mendorong semua ragam pemerintahan untuk terlibat dalam sebuah forum dan bekerja sama untuk membuat sebuah konsesus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public (Feberina et al., 2021).

*Governance* menjadi konsep yang dituntut untuk diterapkan berjalan seiring dengan dinamika perkembangan untuk membawa perubahan dalam pelaksanaan segala tugas, fungsi dan tanggung jawab dari semua sektor baik pemerintah, swasta, masyarakat (Bustomi et al., 2022). Perubahan istilah dari *Good government* ke *Collaborative Governance* merupakan salah satu upaya untuk mendemokratisasi administrasi publik khususnya dalam perumusan sebuah kebijakan publik (Eka et al., 2023). *Collaborative Governance* menjadi sebuah cara baru dalam mengatur roda pemerintahan saat ini karena mendorong semua ragam pemerintahan untuk terlibat dalam sebuah forum dan bekerja sama untuk membuat sebuah konsesus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik (Kanaya Avitadira & Indrawati, 2023). Sebuah konsesus dalam upaya peningkatan pelayanan publik sesungguhnya untuk mewujudkan kenyamanan untuk semua masyarakat dengan mengatasi segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini (Chotimah et al., 2022). Permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat yang terjadi di Indonesia saat ini adalah permasalahan sampah. Sampah juga menjadi salah satu masalah yang belum teratasi, baik itu masalah sampah yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan yang mana sampah timbul dari segala aktivitas manusia yang semakin banyak dan kompleks (Nursalam et al., 2024).

Sampah bukan hanya sekedar persoalan kebersihan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kenyamanan dan perlindungan masyarakat (Susilo et al., 2021). Permasalahan yang mencolok di Kabupaten Belu antara lain disebabkan oleh tidak berfungsinya TPS di sekitar pasar dan masih banyaknya sampah yang berserakan, termasuk di jalan lintas perbatasan Kota Atambua. Padahal, jalur perbatasan seharusnya dijaga keindahan dan kebersihannya. Berdasarkan data DLH tahun 2024, terdapat 110 TPS yang tersebar di empat kecamatan, namun sebagian besar kecamatan lainnya belum memiliki TPS. Ini menjadi salah satu faktor penyebab buruknya sistem pengelolaan sampah.

Masalah sampah juga menjadi salah satu masalah yang saat ini cukup meresahkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Belu. Pertambahan penduduk menjadi faktor utama peningkatan jumlah pengeluaran kebutuhan rumah tangga dengan adanya pertambahan penduduk akan berdampak pada peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Penanganan sampah sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup, yang mana terus mengupayakan penanganan masalah sampah yang ada di Kabupaten Belu dengan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan tenaga penyapu jalan setiap hari, dan pengangkut sampah dan pengambilan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Toruan et al., 2021). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2023 Indonesia menghasilkan timbulan sampah sebesar 38,7 juta ton per tahun, dan baru sekitar 62,13% (24,10 juta ton) yang berhasil dikelola. Sementara itu, sisanya sebanyak 37,87% (14,69 juta ton) belum tertangani dengan baik.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Belu, di mana peningkatan jumlah penduduk dari 224.306 jiwa pada tahun 2022 menjadi 235.709 jiwa pada tahun 2024 turut meningkatkan timbulan sampah yang mencapai 10.164,24 ton per tahun. Namun, hanya sekitar 75,65% (7.690,55 ton) yang berhasil ditangani. Volume sampah yang tidak tertangani ini menyebabkan tumpukan di berbagai titik, mencemari lingkungan, mengganggu keindahan kota, serta mengancam kesehatan dan ketentraman masyarakat.

Penanganan sampah di Kabupaten Belu menjadi tanggung jawab utama Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam implementasinya, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah (Perda) dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2019, setiap individu atau badan diwajibkan untuk memiliki kepedulian terhadap pengurangan produksi sampah dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan.

Meskipun infrastruktur seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) telah disediakan, sebagian besar masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Terdapat pula temuan penumpukan sampah di jalan lintas perbatasan, pasar, saluran air, bahkan pembuangan langsung ke sungai dan laut. Satpol PP Kabupaten Belu telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ini melalui teguran, denda, serta operasi tangkap tangan (OTT), namun kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan utama.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam sektor pengelolaan sampah telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Studi-studi tersebut umumnya menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, hingga saat ini, belum banyak kajian yang secara spesifik meneliti penerapan model *collaborative governance* dalam konteks wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, seperti Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, Kabupaten Belu memiliki tantangan geografis, sosial, dan ekonomi yang unik. Serta dalam kajian sebelumnya belum meneliti terkait dengan kolaborasi antara Satpol PP sebagai penegak perda dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi terkait dalam upaya penanganan sampah. Tantangan tersebut berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah, terutama dalam membangun sinergi antara pemangku kepentingan lokal. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat dan banyaknya volume sampah yang terus bertambah dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya celah pengetahuan yang perlu diisi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerangka *collaborative governance* belum sepenuhnya dipahami atau diimplementasikan secara optimal dalam konteks daerah seperti Kabupaten Belu. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut, sekaligus memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana prinsip-prinsip *collaborative governance* dapat diterapkan secara efektif di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat serta tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi dari penelitian tersebut untuk menunjang penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk memposisikan penelitian dan menemukan kebaruan dari penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya kemudian membuat ringkasan terkait dengan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu dapat memberikan referensi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian karena dapat dijadikan sebagai bahan acuan baik itu dari pembahasan, teori, metode dan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipilih oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam tulisan ini. Penelitian terdahulu membantu penulis untuk mengetahui bagaimana perkembangan penelitian

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat setiap tahunnya, pembaharuan yang terjadi dalam penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai pedoman penelitian yang akan di lakukan oleh penulis. Penelitian yang dijadikan sebagai pedoman yaitu penelitian yang memiliki persamaan topik dan masalah tentang Collaborative Governance dalam penanganan masalah sampah yang ada di Kabupaten Belu yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anissa Aulia Akbar (2021) dengan judul “ Collaborative Governance untuk Peningkatan Kualitas Transportasi di Kota Makassar” dengan lokasi penelitian Kota Makassar untuk meneliti terkait dengan kolaborasi pemerintah dalam peningkatan kualitas transportasi melalui program pasikola dengan teori Collaborative Governance menurut Anshell Gush (2008), yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mendapat hasil penelitian dimana penyelenggaraan Collaborative Governance sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2017 akan tetapi masih ada anak sekolah di Kota Makassar yang belum mengetahui tentang program pasikola ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap anak – anak di sekolah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program pasikola di Kota Makassar. Kedua, penelitian yang dilakukan M Dipo Delpiero Ginting (2022) dengan judul Pendekatan *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan” untuk meneliti terkait dengan collaborative governance dalam pengembangan Kawasan objek wisata Goa Putri Di Kabupaten Ogan Komering Ulu serta mendeskripsikan factor penghambat dalam pelaksanaannya. Lokasi tempat penelitian adalah kawasan objek wisata goa putri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dengan grand teori *Collaborative Governance* Oleh Anshell Gush (2008) yang dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif Sehingga menghasilkan hasil penelitian berupa kolaborasi yang dilakukan masih memiliki kekurangan dan kelemahan tetapi dengan adanya kolaborasi ini terjadi pengembangan sektor swasta berupa peningkatan produk wisata yang menciptakan kepedulian masyarakat dalam upaya mendukung pembangunan daerah. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ainun Salsabila (2023) dengan judul “ *Collaborative Governance* Pada Bank Sampah Di Kota Makassar” yang menjadi fokus peneliti adalah *Collaborative Governance* dalam upaya penanganan sampah yaitu Bank Sampah , dengan teori Goldsmith & Kettl yang menghasilkan secara umum *collaborative Governance* dalam pengelolaan bank sampah sudah cukup baik namun masih ada beberapa indikator yang belum optimal dalam pelaksanaannya yaitu komitmen dalam mencapai tujuan, kepercayaan antar stakeholder serta akses ke sumber yang kurang. Keempat, penelitian terhadap kenakalan remaja yang dilakukan oleh Nisi Maharani (2022) dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Lampung Tengah” memiliki lokus utama yaitu Kabupaten Lampung Tengah dengan Teori Anshell Gush tahun 2007 dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian yang menunjukkan tingkat keberhasilan kolaborasi pemerintah dalam penanganan kenakalan remaja yang dibuktikan dengan penurunan angka tindak pidana yang disebabkan oleh remaja. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Winda Anggraeni pada tahun 2022 dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara” fokus penelitian yaitu mendeskripsikan terkait dengan collaborative governance dalam penanganan stunting serta bagaimana peran dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk terlibat dalam penanganan stunting. Teori Collaborative Governance yang digunakan adalah teori Anshell Gush (2008) dengan metode kualitatif deskriptif yang mendapatkan hasil penelitian pelaksanaan collaborative governance dalam program penanggulangan stunting di Kelurahan Tanjungmas sudah terlaksana secara konvergensi, dimana peran stakeholder semakin aktif dan terorganisir sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan.

#### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dimaksudkan untuk menganalisis kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP serta masyarakat dalam upaya penanganan masalah sampah yang ada di kabupaten Belu. Dari kelima penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi terdapat persamaan yaitu semuanya membahas terkait pelaksanaan *Collaborative Governance* akan tetapi fokus masalah utama yang berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni fokus utama penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam penanganan masalah sampah antara Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Belu dengan Satpol PP Kabupaten Belu sebagai penegak peraturan daerah yang dalam upaya tersebut melibatkan masyarakat sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada kolaborasi antara Pihak swasta dan pemerintah. Kelima penelitian di atas juga memiliki perbedaan terkait dengan lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini fokus utama yang diangkat adalah bagaimana *Collaborative Governance* dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Belu dan menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan teori Anshell Gush, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut Ratner yang terdiri dari tiga dimensi yaitu identifikasi masalah dan hambatan, strategi langkah penyelesaian konflik dan merencanakan tindakan kolaborasi. Lokasi penelitian antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya berbeda dimana penulis melakukan penelitian di Kabupaten Belu terkait dengan *Collaborative Governance* dalam penanganan masalah sampah yang ada di Kabupaten Belu untuk mewujudkan lingkungan kabupaten Belu yang bersih dan asri serta terbebas dari sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Berikut kesimpulan dari masing – masing penelitian terdahulu.

#### 1.5. Tujuan.

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang *Collaborative Governance* dalam Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan melihat peristiwa, menganalisis peristiwa yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode penelitian kualitatif. Hal bertujuan untuk memahami dengan baik mengenai metode penelitian yang tepat dengan langkah-langkah yang tepat dalam proses penelitian berlangsung .

Metode penelitian yang digunakan merupakan salah satu aspek yang krusial dimana memiliki dampak yang signifikan dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data. Karena, data yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah representasi dari objek yang diteliti, untuk itu penelitian dengan metode yang tepat akan menjadi faktor penentu terhadap kualitas data yang diperoleh (Nurdin & Hartati, 2019).

Penulis melaksanakan penelitian kualitatif dengan didasarkan pada pendapat Simangunsong (2017:190) dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mempunyai bentuk desain yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk penelitian kualitatif yang mempunyai sifat emergent yaitu fenomena-fenomena muncul tiba-tiba dengan prinsip alami. Simangunsong (2017:191) juga menjelaskan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang terdapat dalam transkrip.

Menurut Sugiyono (2022:9) Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah, berbeda dengan

eksperimen yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data adalah triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dan generalisasi.

Metode penelitian ini akan membantu mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terkait *Collaborative Governance* dalam penanganan sampah. Metode ini juga membantu untuk memperoleh informasi yang relevan dalam penulisan Skripsi berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penanganan Masalah Sampah Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Penulis memutuskan untuk menerapkan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, metode kualitatif dipilih karena dapat menghasilkan data yang komprehensif, mendalam, dapat dipercaya, dan memiliki signifikasi yang tinggi. Konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah konsep *Collaborative Governance* menurut Ratner yang terdiri dari 3 dimensi. Peneliti memilih konsep ini karena dimensi yang ditentukan dalam konsep ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis bagi peneliti pada saat melakukan penelitian nantinya dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti di lapangan nanti.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Basrowi, 2008). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data berupa narasumber, Peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi dan dokumen atau arsip. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Praja Kabupaten Belu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu Kabupaten Belu, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Sampah Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat yang terjadi di Indonesia saat ini adalah permasalahan sampah. Sampah juga menjadi salah satu masalah yang belum teratasi, baik itu masalah sampah yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan yang mana sampah timbul dari segala aktivitas manusia yang semakin banyak dan kompleks dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan koordinasi antar semua pihak. *Collaborative Governance* menjadi sebuah cara baru dalam mengatur roda pemerintahan saat ini karena mendorong semua ragam pemerintahan untuk terlibat dalam sebuah forum dan bekerja sama untuk membuat sebuah konsesus dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses *Collaborative Governance* Menurut Ratner dalam *Collaborative Governance Assesment* terdiri dari tiga tahap yaitu : Identifikasi hambatan dan peluang, Strategi debat untuk mempengaruhi, dan Merencanakan tindakan kolaborasi.

##### **1. Identifikasi Masalah dan Hambatan**

Identifikasi masalah dan hambatan sebagai langkah awal dalam mengetahui dan menganalisis proses kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanganan sampah di Kabupaten Belu. Dimensi ini terdiri dari 3 indikator yaitu :

###### **a. Masalah dan hambatan dalam Proses Kolaborasi**

- Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat sangat penting dalam penanganan masalah sampah karena

keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan atau teknologi, tetapi juga pada perilaku dan partisipasi aktif dari masyarakat. Ketika masyarakat sadar akan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup, mereka cenderung akan lebih bertanggung jawab dalam memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung program daur ulang. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat sudah mengalami peningkatan dalam pembuangan sampah. Dapat dikatakan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanganan sampah ini membawa dampak yang baik dan sudah terlihat walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih belum membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan jika dilakukan upaya yang berkelanjutan maka kedepannya diharapkan program penanganan sampah di Kabupaten Belu ini dapat berjalan lebih efektif dan bisa mewujudkan visi Kabupaten Belu itu sendiri dalam membangun Kabupaten Belu yang sehat dan berkarakter. Berikut hasil rekap tingkat kesadaran masyarakat kabupaten Belu dalam pembuangan sampah, yang telah direkap oleh bidang pengelolaan sampah dan limbah dinas lingkungan hidup dan perhubungan Kabupaten Belu.

Tabel 3.1  
Data Hasil survey kesadaran masyarakat  
Kabupaten Belu oleh Bidang Pengolahan Sampah DLH Kab. Belu

Periode	Presentase Masyarakat yang selalu membuang sampah di TPS	Presentase Masyarakat yang tidak selalu membuang sampah di TPS	Presentasi Masyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jul -Sept 2023	28 %	60 %	37%
Okt-Des 2023	29%	63%	34%
Jan-Mar 2024	31%	40%	29%
Apr-Mey 2024	38%	44%	18%
Jun-Agu 2024	48%	42%	10%

Sumber : Hasil Survei Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa presentasi masyarakat yang tidak selalu membuang sampah pada tempatnya mengalami penurunan dalam kurun waktu dari bulan juli tahun 2023, sampai bulan agustus 2024. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat sejauh ini mulai menunjukkan hasil yang positif walaupun masih ada 10 % masyarakat Kabupaten Belu yang belum membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menandakan bahwa *Collaborative governance* yang dilakukan di Kabupaten Belu dalam penanganan sampah sudah berjalan baik namun hambatan seperti kesadaran masyarakat ini perlu diperhatikan untuk mencapai peningkatan yang lebih baik kedepannya.

Berikut peneliti lampirkan data terkait dengan jumlah personil Satpol PP Kabupaten Belu.

Tabel 3.2  
Struktur Kepegawaian Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Belu

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala	1 orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	4 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang
5.	Kepala Seksi	8 Orang
6.	Staf/ Non Eselon PNS	30 Orang
7.	Staf / Pegawai Tidak Tetap (PTT)	78 Orang
Jumlah		124 Orang

Sumber : Sub bagian umum dan Kepegawaian, 2025

Satpol PP Kabupaten Belu tidak hanya mengatasi permasalahan sampah tetapi juga mengupayakan ketertiban di Kabupaten Belu yang cakupannya cukup luas sehingga jumlah personil yang dibutuhkan tentu harus memadai karena banyak infroman yang harus ditepatkan di berbagai titik yang merupakan tempat terjadinya pelanggaran pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

- **Jumlah Personil**

Jumlah personil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah personil yang terlibat dalam *Collaborative governance* yang dilakukan di Kabupaten Belu dalam penanganan sampah. Jumlah Personil Satpol PP Kabupaten Belu sendiri berjumlah 124 personil yang mana 78 orangnya adalah pegawai tidak tetap tentu hal ini berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Satpol PP Kabupaten Belu tidak hanya mengatasi permasalahan sampah tetapi juga mengupayakan ketertiban di Kabupaten Belu yang cakupannya cukup luas sehingga jumlah personil yang dibutuhkan tentu harus memadai karena banyak infroman yang harus ditepatkan di berbagai titik yang merupakan tempat terjadinya pelanggaran pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. jumlah tenaga kerja di Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Belu berjumlah 181 yang terdiri dari 40 PNS dan 141 Tenaga Kontrak. Akan tetapi pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir sulit untuk dikontrol apabila hanya 6 petugas sementara sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir tidak menentu dan setiap petugas harus memiliki tanggung jawab yang berganda baik itu dalam proses pengelolaan atau proses pemusnaan sampah di tempat pembuangan akhir.

- **Sarana dan Prasarana**

Terkait dengan Sarana Prasarana saat ini Kabupaten Belu masih memiliki kekurangan TPS yang masih belum ada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Belu dan sampai saat ini masih kami usahakan terkait dengan hal itu. Selain itu, saat ini juga Dinas Lingkungan Hidup sedang mengusulkan tanggul atau perkuatan tebing dan bulldozer yang saat ini dalam keadaan rusak berat untuk diperbaiki sehingga dapat membantu proses pengolahan sampah di TPA Lelawai. Pengelolaan sampah yang

terencana dan efisien, kualitas lingkungan di Kabupaten Belu dapat meningkat secara signifikan. Tidak kalah pentingnya adalah upaya menyadarkan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Dengan sarana prasarana yang tersedia, masyarakat akan lebih mudah untuk ikut serta dalam program-program kebersihan, seperti pemilahan sampah organik dan non-organik. Hal ini juga mendorong terciptanya budaya lingkungan yang bersih dan sehat di kalangan warga. Dengan kata lain, pembangunan sarana dan prasarana yang optimal dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belu akan memperkuat upaya penanganan sampah secara menyeluruh. Keberhasilan pengelolaan sampah yang baik juga akan memberikan dampak baik bagi daerah, karena lingkungan yang bersih akan mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Belu ke depan

b. Aktor Kunci

Aktor kunci adalah individu atau entitas yang memainkan peran penting dalam suatu sistem, proses, atau organisasi. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap jalannya sebuah peristiwa atau keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam berbagai konteks, aktor kunci bisa berbeda-beda, tergantung pada situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian dengan topik *Collaborative Governance* dalam penanganan sampah di Kabupaten Belu ada beberapa aktor kunci yang mendominasi terselenggarakannya kolaborasi dalam upaya penanganan sampah di Kabupaten Belu sendiri. Pentingnya peran masyarakat, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu dalam menyelesaikan permasalahan sampah sangatlah besar. Masyarakat sebagai sasaran program penyelesaian masalah sampah. Satpol PP bertugas untuk menegakkan aturan, memberikan sanksi bagi yang melanggar, serta menjaga kebersihan di wilayah umum. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk merancang kebijakan pengelolaan sampah yang efektif, mengedukasi masyarakat, serta memfasilitasi proses pengelolaan sampah, termasuk daur ulang dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Ketiga pihak ini harus bekerja sama secara sinergis agar permasalahan sampah dapat teratasi dengan baik dan berkelanjutan. Sebagai pihak yang menjadi kunci pelaksanaan kolaborasi dalam penanganan sampah di Kabupaten Belu berikut data yang menunjukkan program kolaborasi antara Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, serta masyarakat Kabupaten Belu.

c. Kewenangan

Satpol PP dan DLH Kabupaten Belu memiliki peran yang saling melengkapi dalam penanganan sampah. Satpol PP lebih berfokus pada penegakan hukum dan pengawasan terkait kebersihan lingkungan, sementara DLH menangani aspek teknis dan operasional pengelolaan sampah. Kolaborasi kedua instansi ini sangat penting agar pengelolaan sampah di Kabupaten Belu dapat berjalan dengan baik, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

2. Strategi Penyelesaian Konflik

Strategi dalam penyelesaian masalah berarti dalam proses kolaborasi tentu harus ada hubungan kerja sama yang dibangun sebagai sebuah strategi dalam menyelesaikan masalah yang ingin dipecahkan sehingga diperlukan strategi yang baik dan tepat pada sasaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada tiga indikator yang harus dipenuhi yaitu :

a. Dialog dan diskusi dalam proses kolaborasi

Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup harus terlibat langsung dalam pencarian solusi yang tidak hanya

berfokus pada pembuangan sampah, tetapi juga pada upaya pengurangan dan daur ulang sampah. Melalui diskusi terbuka, masyarakat dapat mengungkapkan keluhan dan permasalahan yang mereka hadapi terkait sampah. Misalnya, banyak warga yang tidak tahu cara pemilahan sampah dengan benar, atau kesulitan dalam mengakses tempat pembuangan sampah yang sesuai. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup bisa menjelaskan kebijakan yang sudah diterapkan, kendala yang mereka hadapi dalam mengelola sampah, serta rencana ke depan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belu.

b. Strategi dan langkah penyelesaian yang dilakukan

Strategi merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan terkoordinasi dalam penanganan sampah. Salah satu pendekatan yang bisa diimplementasikan adalah *collaborative governance*, yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, maupun masyarakat. Melalui pendekatan ini, penyelesaian masalah sampah dapat dilakukan secara bersama-sama dengan memanfaatkan berbagai keahlian dan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Dalam penelitian ini diketahui bahwa ada berbagai macam strategi yang dilakukan yaitu Sosialisasi dan edukasi di sekolah, pasar, dan rumah ibadah, Razia dan patroli rutin di titik rawan pembuangan liar, Penjadwalan ulang dan optimalisasi armada, Pendampingan dan pelatihan pengelolaan sampah anorganik, Kampanye melalui Media sosial, dan Penutupan dan rehabilitasi TPS liar. Berbagai strategi yang sudah dilakukan ini sudah membawa berbagai perubahan namun belum sepenuhnya membawa dampak yang optimal.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi

*Collaborative Governance* yang sudah dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta masyarakat dalam upaya penanganan sampah yang ada di Kabupaten Belu memerlukan tindakan lanjutan. Tindakan lanjutan ini berkaitan dengan tindakan kolaborasi lanjutan yang akan dilaksanakan guna mempertahankan dan kolaborasi dan mencapai tujuan yang telah ditentukan serta menyelesaikan segala masalah dan hambatan yang terjadi pada kolaborasi sebelumnya. Perencanaan tindakan kolaborasi lanjutan ini tentu sangat penting agar kedepannya apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan menghindari segala kemungkinan kesalahan yang terjadi serta bertujuan untuk memudahkan semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada sehingga menghindari segala kemungkinan timbulnya hambatan yang tidak diinginkan kedepannya. Ada dua indikator yang harus dipenuhi dalam perencanaan kolaborasi ini yaitu :

a. Keberhasilan dari kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanganan Sampah di Kabupaten Belu

Keberhasilan penanganan sampah di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Instansi terkait tidak bekerja sendiri namun bekerja sama dengan instansi lain dan melibatkan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program-program pengelolaan sampah. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang. *Collaborative Governance* yang dilaksanakan di Kabupaten Belu dalam upaya penanganan sampah sudah berjalan

dengan baik hal ini dapat kita lihat dari berbagai program- program yang telah dilaksanakan sebagai strategi dalam upaya penanganan sampah. Salah satu kunci keberhasilan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Edukasi dilakukan secara menyeluruh, dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, dan kampanye lingkungan.

b. Evaluasi dari Kolaborasi yang dilakukan

Dinas lingkungan hidup bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis sampah, termasuk pengangkutan, pemilahan, dan pemrosesan akhir sampah. Sementara itu, Satpol PP lebih berfokus pada aspek penegakan hukum dan ketertiban, seperti menindak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, serta mendampingi dinas lingkungan hidup dalam operasi lapangan. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup kegiatan edukatif seperti penyuluhan kepada masyarakat dan pengawasan berkala terhadap lokasi rawan sampah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kolaborasi ini membawa sejumlah dampak positif. Salah satunya adalah meningkatnya efektivitas penertiban dan pengawasan. Dengan keterlibatan Satpol PP dalam kegiatan DLH, operasi pembersihan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang kebersihan menjadi lebih tegas dan mendapat respon cepat. Warga mulai menunjukkan kepatuhan terhadap aturan pembuangan sampah dan beberapa titik rawan sampah liar mengalami penurunan signifikan. Selain itu, kerja sama ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif di masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. *Collaborative Governance* yang sudah berjalan ini membawa hasil yang positif namun ada hambatan yang masih perlu ditingkatkan dalam upaya penanganan sampah ini agar kedepannya kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belu yang lebih baik pula. Berdasarkan hasil penelitian identifikasi masalah dan hambatan masih ada hambatan berupa jumlah personil dan sarana prasarana yang masih yang harus diadakan untuk meningkatkan kualitas kerja baik itu Satpol PP maupun Dinas Lingkungan Hidup dan perhubungan Kabupaten Belu sehingga keberlanjutan kolaborasi kedepannya dapat terjamin serta menghindari segala kemungkinan- kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam upaya penanganan masalah sampah ini.

#### 1.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam penanganan sampah di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, ditemukan sejumlah temuan utama yang menggambarkan dinamika kolaborasi antarpihak dalam mengelola permasalahan sampah di daerah tersebut. berkaitan dengan *Collaborative Governance* sudah banyak penelitian yang dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anissa Aulia Akbar (2021) yang berfokus pada *Collaborative Governance* dalam melaksanakan program pasikola di kota makassar yang menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* yang dilakukan sudah berlangsung 2017 akan tetapi belum tepat pada sasaran karena masih ada anak sekolah yang belum mengetahui tentang program pasikola ini. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh di Kota Makassar akan tetapi berfokus pada *Collaborative Governance* pada Bank Sampah yang menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* yang dilakukan yaitu terkait dengan komitmen dan kepercayaan antar stakeholder serta akses sumber daya yang kurang. M Dipo Delpiero Ginting (2022) dengan judul Pendekatan *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan” untuk meneliti terkait dengan *collaborative governance*

dalam pengembangan Kawasan objek wisata Goa Putri Di Kabupaten Ogan Komering Ulu serta mendeskripsikan factor penghambat dalam pelaksanaannya. Lokasi tempat penelitian adalah kawasan objek wisata goa putri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dengan grand teori Collaborative Governance Oleh Anshell Gush (2008) yang dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif Sehingga menghasilkan hasil penelitian berupa kolaborasi yang dilakukan masih memiliki kekurangan dan kelemahan tetapi dengan adanya kolaborasi ini terjadi pengembangan sektor swasta berupa peningkatan produk wisata

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam penanganan sampah di kabupaten Belu ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* yang dilakukan dalam upaya penanganan sampah di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sudah berjalan namun belum maksimal karena masih ditemukan beberapa hambatan dan masalah dalam upaya penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu dengan Satpol PP Kabupaten Belu diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP yang harus di optimalkan, serta kurangnya sarana prasarana yang digunakan dalam upaya penanganan sampah di Kabupaten Belu.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama penulis tujukan kepada seluruh perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dan Desa Penfui Timur yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Ucapan terimakasih yang tulus penulis juga sampaikan kepada dosen pembimbing. Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si., atas segenap bimbingan dan arahnya selama pelaksanaan penelitian ini.

Terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bersedia menjadi narasumber, baik dari Satuan Polisi Praja Kabupaten Belu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu dan kepada masyarakat masyarakat kabupaten belu yang menjadi narasumber atas waktu, informasi, dan wawasan berharga yang telah dibagikan.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, A. A. (2021). Collaborative Governance Untuk Peningkatan Kuantitas Pelayanan Transportasi Di Kota Makassar. *Doctoral Dissertation UNHAS*. [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7785/4/E011171001\\_skripsi\\_06-10-2021.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7785/4/E011171001_skripsi_06-10-2021.pdf)
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Pertama). PT RINEKA CIPTA.
- Bodin, Ö. (2017). Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems. *Science*, 357(6352). <https://doi.org/10.1126/science.aan1114>
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). PARTISIPASI PUBLIK DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM SISTER CITY BANDUNG DAN JEPANG DALAM MENANGGULANGI SAMPAH DI KOTA BANDUNG. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 48–64. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037>

- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2022). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348. <https://doi.org/10.22146/jkn.69661>
- Eka, N., Setiawandari, P., & Kriswibowo Prodi, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Collaboration Governance In Waste Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149–155. <https://jke.ejournal.unri.ac.idhttps://jke.ejournal.unri.ac.id>
- Feberina, A., Mulyadi, A. W. E., & Haryanti, R. H. (2021). Collaborative governance in solving problem air pollution in Indonesia: a systematic literature review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 905(1), 012097. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012097>
- Fernandes, S. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Ginting, M. D. D. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan*. INSTITU PEMERINTAHAN DALAM NEGERI. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8343>
- Kanaya Avitadira, & Indrawati, N. (2023). Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 : Tinjauan Collaborative Governance. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.147>
- Maharani, N. (2022). *Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kabupaten Lampung Tengah*. Universitas Negeri Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/65851/>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Nursalam, Aslam, M., Salam, C., & Saleh, B. (2024). Model Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Kupang. *JDISTIRA*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.58794/jdt.v4i1.810>
- Salsabila, A. (2023). *Collaborative Governance Pada Bank Sampah Di Kota Makassar*. Universitas Hasanudin. [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31091/2/E011171525\\_skripsi\\_26-10-2023%20BA%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/31091/2/E011171525_skripsi_26-10-2023%20BA%201-2.pdf)
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.
- Susilo, D., de Leon, M. V., Dwi Putranto, T., & Kurnia Hartati, F. (2021). Food waste handling perception in Indonesia: communicating the sustainability of Food and environment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 892(1), 012109. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/892/1/012109>
- Toruan, L. N. L., Tallo, I., & Saraswati, S. A. (2021). Sebaran Sampah Pantai di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur: Kajian pada Pantai Rekreasi. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 9(1), 92–108. <https://doi.org/10.14710/jwl.9.1.92-108>
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Salsabila, L. (2025). Collaborative Governance in Handling the Waste Crisis: A Systematic Literature Review. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(2), 761–770. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200225>